

DAFTAR REFRENSI

Buku

Arsyad, Jawade Hafidz. 2013. Korupsi Dalam Perspektif HAN. Sinar Grafika.

Jakarta

Asikin, Zainal. 2012. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Raja Grafindo Persada.

Jakarta

Asshiddiqie, Jimly. 2019. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Raja Grafindo

Persada. Jakarta

Asshiddiqie, Jimly. Ali Safa'at. 2006. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum.

Konstitusi Press. Jakarta

Atmosudirdjo, Prajudi. 1994. Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia.

Jakarta

Dwiyatmi, Sri Harini. 2013. Pengantar Hukum Indonesia. Ghalia Indonesia.

Jakarta

Efendi, A'an. Freddy Poernomo. 2017. Hukum Administrasi. Sinar Grafika.

Jakarta

Hariri, Wawan Muhwan. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Pustaka Setia. Bandung

Hartini, dkk. 2010. Hukum Kepegawaian Di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta

Isharyanto. 2016. Politik Hukum. CV. Kekata Group. Surakarta

Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta

Disertasi. Alfabeta. Bandung

Mahdi, Imam. Iskandar Zulkarnain Oktaria. 2013. Hukum Administrasi Negara.

IPB Press. Bogor

Indra, Mexsasai. 2021. Hukum Administrasi Negara. Samudra Biru. Yogyakarta

Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press. Mataram

Munaf, Yusri. 2016. Hukum Administrasi Negara. Marpoyan Tujuh Publishing.

Pekanbaru

Praja, Juhaya S. 2014. Teori Hukum dan Aplikasinya. Pustaka Setia. Bandung

Rahardjo, Satjipto. 2014. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung

Remaja, I Nyoman Gede. 2017. Hukum Administrasi Negara. Fakultas Hukum

Universitas Panji Sakti. Bali

Ridwan, HR. 2018. Hukum Administrasi Negara. Rajagrafindo Persada. Jakarta

Ridwan, Juniarso, dkk. 2014. Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan

Layanan Publik. Nuansa Cendekia. Bandung

Rumokoy, Donal Albert, dkk. 2014. Pengantar Ilmu Hukum. Raja Grafindo

Persada. Jakarta

Saebani, Beni Ahmad. 2009. Metode Penelitian Hukum. Pustaka Setia. Bandung

Salim, dkk. 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi.

Raja Grafindo Persada. Jakarta

Soemantri, Sri. 2014. Hukum Tata Negara Indonesia. Remaja Rosdakarya.

Bandung

Soeroso, R. 2014. Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika. Jakarta

Sugiarto, Umar Said. 2015. Pengantar Hukum Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta

Voll, Willy DS. 2013. Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara. Sinar Grafika. Jakarta

Zainuddin, dkk. 2013. Pengantar Ilmu Hukum. Smart Media Alia. Banten.

Jurnal

Ariza, Raja. 2021. Penguatan Fungsi Organisasi Melalui Jabatan Fungsional Studi Kasus Sekretariat Daerah provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN). ISSN 2354-5798.

Fitrianingrum, Lia, dkk. 2020. Pengembangan Karier Jabatan Fungsional Dari Hasil Penyetaraan Jabatan Administrasi : Analisis Implementasi dan Tantangan. Civil Service, Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS .Vol. 14 No.1

Mahardika, Ahmad Gelora. 2022. Rekonstruksi Politik Hukum Pengaturan ASN Dalam Sistem Hukum Kepegawaian Di Indonesia. Jurnal RechtsVinding. Media Pembina Hukum Nasional. Volume 11 Nomor 2.

Maulana, Dzikry. 2022. Implementasi Program Penataan dan Penguatan Organisasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan kebijakan Publik. Vol. 5 No. 2

Panca, Widya Timur, dkk. 2022. Implementasi Penyetaraan Jabatan Admiistrasi Tenaga Kependidikan ke Jabatan Fungsional di Universitas Negeri Surabaya. Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan (JDMP). Vol. 7 No. 1

Permatasari, Citra, dkk. 2021. Penyetaraan Pola Karier Pasca Jabatan Administrasi Ke Jabatan Fungsional. *Jurnal Transformasi Administrasi*. Vo. 11 No.2

Rakhman, Fahmi Aulia. 2020. Pengalihan Jabatan Struktural Ke Jabatan Fungsional : Suatu Analisa Kompensasi Atas Penghapusan Jabatan Eselon III dan IV Di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur. *Jurnal Aparatur*. Vol. 4 No. 2

Rakhmawanto, Ajib. 2021. Analisis Dampak Perampangan Birokrasi Terhadap Penyetaraan Jabatan Administrator dan Pengawas. *Civil Service*. Vol. 15, No. 2.

Rohman, M. Najibur, dkk. 2021. Kebijakan Pemangkasan Sturktur Birokrasi Di Indonesia. *Volksgeist* Vo. 4 No. 2

Rusliandy. 2022. Analisis Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, April 2022, Volume 8, Nomor 1 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN: 2442-949X)

Saifuddin. 2022. Implementasi Kebijakan Penyetaraan Jabatan Administrator dan Pengawas Ke Jabatan Fungsional (Studi Kasus Di UIN AR-Raniry Banda Aceh). *Journal of Education Science (JES)* 8 (2)

Setiawan, Irfan, dkk. 2022. Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Organisasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*. Vol. 2 No. 1

Sukamtono, dkk. 2022. Perubahan Jabatan : dampaknya Pada Kinerja dan Kesejahteraan. Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Informatika (JBMI). Vo. 18 No. 3

Sumarna, Andri, Hendra Warman. 2022. Analisis Penerapan Kebijakan Penyetaraan Jabatan Di Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian penyakit. Jurnal kewarganegaraan Vol.6 No.1. P-ISSN:1978-0184 E-ISSN: 2723-2328

Susiawati, Marlia. 2021. Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Untuk Mewujudkan Birokrasi Profesional (Studi Kasus Perampingan Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Wonosobo. Jurnal Widya Praja, Vol. 1 No. 2

Sumber Internet

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo. 2021. Dalam Rapat Kerja Instansi Paguyuban PANRB di Surakarta, Jawa Tengah. Menakar Hasil Penyederhanaan Birokrasi. menpan.go.id

Ananda. Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Kepegawaian

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.07/2019 Tentang Prtunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah
Untuk Penyederhanaan Birokrasi

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 998 Tahun 2021 Tentang Standar Penyetaraan Jabatan dan jenis
Jabatan Dalam Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam jabatan
Fungsional Bagi Instansi Daerah

Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1505 Tahun 2021 Tentang
Koordinator dan Sub Koordinator di Lingkungan Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau